

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 278,69 jiwa pada pertengahan tahun 2023 (Badan Pusat Statistik, 2023). Melihat banyaknya jumlah penduduk tersebut menyebabkan Indonesia seringkali menghadapi permasalahan yang cukup kompleks seperti permasalahan mengenai kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk merupakan suatu perbandingan antara banyaknya penduduk dengan luas lahan yang tersedia tidak seimbang, akibatnya jika jumlah penduduk mengalami peningkatan namun lapangan pekerjaan tidak bertambah, maka tingkat pengangguran juga mengalami peningkatan (Pramudjasi. et al., 2019).

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan makro jangka panjang yang ada di beberapa kota di negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Keadaan suatu negara dapat ditentukan dengan melihat tingkat penganggurannya, apakah perekonomiannya berkembang atau lambat bahkan sampai mengalami kemunduran. Selain itu dengan tingkat pengangguran, dapat dilihat pula ketimpangan atau kesenjangan distribusi pendapatan yang diterima suatu masyarakat negara tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah penduduk selalu bertambah tahun ke tahun hampir semakin meningkat (Anggoro & Soesatyo, 2015). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran, diantaranya tingkat pendidikan. Dimana tingkat pendidikan dari tenaga kerja tersebut dapat menentukan kualitas dari tenaga kerja tersebut. Pendidikan merupakan hal yang

penting karena setiap lapangan kerja yang tersedia membutuhkan kemampuan khusus pada bidangnya. Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi kualitas tenaga kerja, tingginya tingkat pendidikan akan cenderung menentukan kualitas sumber daya manusia dari tenaga kerja tersebut. Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor utama bagi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini karena pendidikan merupakan salah satu dasar untuk memperkirakan kualitas seseorang. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi cenderung dianggap memiliki kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang memiliki pendidikan yang relatif lebih rendah. (Prakoso, 2020)

Pengangguran merupakan seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja dan ingin bekerja tetapi masih belum mendapatkan pekerjaan (Marlini Septi, 2020). Jadi dapat dikatakan bahwa istilah pengangguran merupakan sebutan untuk mereka yang berada dalam angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan tetapi belum menemukannya. Pengangguran dapat terjadi ketika tingginya tingkat pergantian angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan kerja yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja tidak memadai, hal ini disebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan angkatan kerja yang siap bekerja (Anggoro & Soesatyo, 2015).

Pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja yakni 15 tahun keatas yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan definisi pengangguran menurut (BPS, 2023) pengangguran yakni (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan

usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Seperti yang terjadi di Kota Surabaya yang merupakan kota metropolitan yakni Kota paling besar kedua di Indonesia setelah Jakarta sekaligus menjadi Ibu Kota Provinsi Jawa Timur. Tetapi pada kenyataannya tingkat pengangguran yang ada di Kota Surabaya masih cukup tinggi. Dari data yang diperoleh oleh peneliti dari BPS Provinsi Jawa Timur tingkat pengangguran di Jawa Timur Surabaya menempati posisi ke enam yaitu sebesar 7,62 persen (Berita Resmi Statistik, 2022).

Tabel 1. 1 Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur 2020-2022

Kabupaten / Kota	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022
3515 Sidoarjo	10,97	10,87	8,80
3579 Kota Batu	5,93	6,57	8,43
3526 Bangkalan	8,77	8,07	8,05
3525 Gresik	8,21	8,00	7,84
3573 Kota Malang	9,61	9,65	7,66
3578 Kota Surabaya	9,79	9,68	7,62
3506 Kediri	5,24	5,15	6,83
3504 Tulungagung	4,61	4,91	6,65
3507 Malang	5,49	5,40	6,57
3577 Kota Madiun	8,32	8,15	6,39
3575 Kota Pasuruan	6,33	6,23	6,18
3524 Lamongan	5,13	4,90	6,05
3514 Pasuruan	6,24	6,03	5,91
3519 Madiun	4,80	4,99	5,84
3502 Ponorogo	4,45	4,38	5,51
3517 Jombang	7,48	7,09	5,47
3505 Blitar	3,82	3,66	5,45
3572 Kota Blitar	6,68	6,61	5,39
3503 Trenggalek	4,11	3,53	5,37
3510 Banyuwangi	5,34	5,42	5,26
3576 Kota Mojokerto	6,74	6,87	5,05
3508 Lumajang	3,36	3,51	4,97

Kabupaten / Kota	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022
3516 Mojokerto	5,75	5,54	4,83
3518 Nganjuk	4,80	4,98	4,74
3522 Bojonegoro	4,92	4,82	4,69
3574 Kota Probolinggo	6,70	6,55	4,57
3523 Tuban	4,81	4,68	4,54
3571 Kota Kediri	6,21	6,37	4,38
3520 Magetan	3,74	3,86	4,33
3511 Bondowoso	4,13	4,46	4,32
3509 Jember	5,12	5,44	4,06
3501 Pacitan	2,28	2,04	3,65
3512 Situbondo	3,85	3,68	3,38
3513 Probolinggo	4,86	4,55	3,25
3527 Sampang	3,35	3,45	3,11
3521 Ngawi	5,44	4,25	2,48
3528 Pamekasan	3,49	3,10	1,40
3529 Sumenep	2,84	2,31	1,36
Total	5,84	5,74	5,49

Sumber : BPS Provinsi Jatim, 2023

Melihat pada persentase jumlah pengangguran di atas, Surabaya masuk ke dalam 10 besar tingkat pengangguran tertinggi di Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya masih terus melakukan upaya dalam menangani permasalahan pengangguran yang ada di Kota Pahlawan ini, salah satunya dengan program padat karya. Dalam rangka untuk terealisasi tercapainya program padat karya maka pemerintah menetapkan suatu kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 tentang Program Padat Karya di Kota Surabaya. dimana Peraturan Walikota tersebut perlu diimplementasikan. Implementasi Kebijakan merupakan bentuk nyata dari suatu perencanaan yang sebelumnya sudah disusun, jika dilakukan dengan baik dan tepat maka akan berpengaruh terdapat pencapaian tujuan yang sudah ditentukan, namun apabila tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, hal ini akan menjadi suatu masalah atau kendala-kendala

yang dihadapi dalam aktivitas atau kegiatan tersebut. Implementasi mencakup berbagai tindakan dan upaya yang dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan bersama baik dalam instansi pemerintah, swasta maupun dalam instansi lainnya (Hertati & Arif, 2018). Menurut Mazmanian dan Sabatier (Widodo, 2010) dalam (Anggara, 2014 : 232) dasar dari implementasi kebijakan yakni memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program dirumuskan. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan tersebut (Anggara, 2014).

Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat sebagai dampak program padat karya, pemerintah menyusun kebijakan mengenai upah program padat karya pada tahun 2017. Hal ini dilakukan dengan penerbitan bersama empat keputusan menteri tentang sinkronisasi dan penguatan tersebut yakni (Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Terkepong, dan Transmigrasi (PDDT)). Desa wajib menaati peraturan yang ada dalam Pasal 6 Tahun 2014 tentang Desa (Aqila et al., 2023).

Upaya pemerintah dalam memberantas pengangguran didasarkan pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan mengenai upaya dalam menciptakan lapangan kerja baru dan/atau menyediakan lapangan kerja yang ada berdasarkan perjanjian kerja yang memasukan unsur upah, pekerjaan dan tunjangan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2013

Pasal 1 Ayat 3. Dalam program padat karya ini melibatkan masyarakat khususnya MBR dan masyarakat yang tidak bekerja merupakan tujuan pemerintah.

Di Kota Surabaya sendiri pengangguran masih menjadi salah satu fokus utama bagi Pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya masih terus berupaya dalam menangani pengangguran yang menjadi salah satu penyebab kemiskinan di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya sangat serius dalam menyelesaikan pengangguran yang ada di Kota Pahlawan ini. Salah satunya dengan program padat karya yang menjadi salah satu gagasan pengentasan pengangguran dan kemiskinan. Hal ini direncanakan dengan melibatkan para pengangguran dan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dalam mengelola aset milik Pemerintah Kota Surabaya.

“Pemkot Surabaya secara transparan menyediakan lahan bagi masyarakat melalui aset yang dimiliki untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Seperti menyediakan lahan yang dimanfaatkan untuk warga dan hasilnya juga diberikan seluruhnya kepada warga”.

(Sumber : <https://www.surabaya.go.id/id/berita/70217/program-padat-karya-surabaya-jadi-percontohan-dalam-penanggulangan-kemiskinan> Diakses 6 September 2023)

Dilansir pada website Pemerintah Kota Surabaya dilihat bahwa padat karya ini merupakan salah satu program Pemerintah Kota Surabaya yang dijalankan dengan memanfaatkan aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan memprioritaskan para pekerja dari keluarga miskin dan yang belum bekerja. Hal ini dikarenakan tingkat Pengangguran di Surabaya masih tergolong tinggi. Selain itu nanti hasil dari program tersebut sepenuhnya diberikan kepada warganya.

Berdasarkan penelitian (Novanto & Wibawani, 2023) mengenai Implementasi Program Padat Karya Tunai Desa bahwa Program Padat Karya Tunai

Desa (PKTD) masih ditemukan desa yang terkendala dengan anggaran dan kapasitas SDM yang lemah bahkan rekrutmen tenaga kerja tidak tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi PKTD di Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Hasil dalam penelitian ini menemukan bahwa implementasi dari isi kebijakan PKTD sudah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wedi, namun karena keterbatasan anggaran membuat pemerintah Desa meniadakan PKTD untuk program prioritas desa lainnya.

Penelitian serupa yang dilakukan oleh (Risa et al., 2021) mengenai implementasi program padat karya tunai dari dana desa dalam mengatasi kemiskinan masyarakat di Desa Karang Gading, hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Implementasi program Padat Karya Tunai dari Dana Desa Karang Gading pada kegiatan rabat beton penimbun sirtu di Dusun 6 untuk tahun anggaran 2020 hasilnya masih belum maksimal. Hal ini disebabkan karena komunikasi yang belum maksimal, dimana sumber daya belum cukup memadai, struktur birokrasi juga belum sepenuhnya tertata dengan baik.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Budiasa et al., 2019) mengenai Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) pada Masyarakat Miskin di Desa Lebih, Gianyar, hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) di Desa Lebih, dimana program padat karya tunai sudah dilaksanakan secara efektif, antara lain membayar pekerja secara tunai, memanfaatkan Dana Desa untuk melaksanakan kegiatan PKT, menyelesaikan proyek prioritas, dan mengajak masyarakat untuk melakukan swakelola.

Terlaksananya PKT didukung oleh beberapa faktor yakni kebijakan Pemerintah, kelembagaan desa, kesediaan tenaga kerja dan jenis pekerjaan. Selain faktor pendukung ada juga faktor penghambat dalam melaksanakan implementasi PKT tersebut yakni kurangnya penyelarasan perencanaan desa serta keahlian pekerja

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu, penulis dapat mengambil garis besar bahwa program padat karya merupakan salah satu program pemerintah yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat, namun dalam pengimplementasiannya masih ditemukan beberapa kendala. Penelitian ini masih sangat relevan untuk dilakukan mengingat masih banyaknya kendala dalam pengimplementasian program padat karya.

Dalam Peraturan Walikota Surabaya, Nomor 83 Tahun 2023 Padat karya merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui keluarga miskin yang tidak bekerja secara produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dengan tujuan mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Program padat karya berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2023 dalam pasal 5 menjelaskan bahwa Program padat karya ini memberikan manfaat bagi masyarakat diantaranya 1). memperluas kesempatan kerja bagi keluarga miskin, 2). meningkatkan pendapatan serta mempertahankan daya beli keluarga miskin, dan 3). memperluas akses pelayanan dasar.

Dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 tentang Program Padat Karya di Kota Surabaya, dalam pasal 3 disebutkan tujuan dari program ini diantaranya adalah untuk mewujudkan peningkatan akses keluarga miskin kepada pelayanan dasar dengan berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat,

penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan pembangunan secara swakelola dan Padat Karya, mengurangi jumlah keluarga miskin di Daerah, meningkatkan pendapatan keluarga miskin di daerah. Program padat karya binaan Pemerintah Kota Surabaya ini banyak jenisnya bentuknya diantaranya cafe, sentra menjahit, laundry, kampung batik, cuci kendaraan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) budidaya pertanian dan peternakan, rumah magot sampai pembuatan paving. Program padat karya ini tersebar di wilayah Kota Surabaya dengan jenis usaha yaitu ada usaha non pertanian dan usaha pertanian. Melansir dari website Antaratim setidaknya ada 34 rumah padat karya yang didirikan di Kota Surabaya. Sejumlah rumah padat karya yang telah terdata itu lokasinya tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Surabaya (Hakim, 2023).

“**Antaratim-** Dikatakan oleh walikota surabaya bahwa tujuan akhir dari program padat karya ini adalah untuk mengentas kemiskinan di Kota Surabaya. Makanya, saat mengembangkan padat karya, semua pihak saya minta tidak hanya meninggalkan ego sektoral, tetapi juga harus memiliki kebersamaan dan gotong royong. Dengan demikian, ekonomi kerakyatan setempat bisa digerakkan, selain itu walikota juga memastikan bahwa program padat karya ini memanfaatkan aset sekitar 9,5 juta atau 9.555.372 meter persegi lahan kosong atau lahan tidur milik Pemkot Surabaya.”
(Sumber: <https://jatim.antaranews.com/berita/725052/wali-kota-surabaya-entas-kemiskinan-lewat-padat-karya> / Diakses 6 September 2023)

Bagi Walikota Surabaya Bapak Eri Cahyadi tujuan dari program padat karya adalah untuk mengurangi pengangguran serta kemiskinan yang ada di kota Surabaya, selain itu program padat karya ini memanfaatkan aset lahan milik pemkot. Namun, Bapak Eri juga menegaskan bahwa dalam pengelolaan lahan itu nantinya warga akan diberi pendampingan serta pelatihan dari pemerintah kota.

“Walikota Surabaya mengatakan bahwa masyarakat juga dibagi dalam pemanfaatan lahannya, karena harus disesuaikan dengan lokasi tempat

tinggal mereka. Jadi, sudah ada kelompok warga miskin yang bertanggung jawab di setiap lahan, dan pastinya itu selalu diawasi oleh jajaran pemkot”

(Sumber: <https://jatim.antaranews.com/berita/725052/wali-kota-surabaya-entas-kemiskinan-lewat-padat-karya/> / Diakses 6 September 2023)



Gambar 1. 1 Program Padat Karya Kota Surabaya

Sumber : Barometer Jatim <https://www.barometerjatim.com/news-7208-rumah-padat-karya-surabaya-serap-ratusan-tenaga-kerja-dari-keluarga-mbr>

Dilihat dari gambar 1.1 diatas program padat karya sudah tersebar di beberapa Kecamatan yang ada di Kota Surabaya, salah satunya adalah di Kecamatan Bubutan yang merupakan kecamatan terpadat nomor tiga di Kota Surabaya pada tahun 2022 (Maryanti, 2023), selain itu Kecamatan Bubutan merupakan satu-satunya kecamatan yang memiliki jenis usaha berupa kampung

batik. Pemerintah Kota Surabaya telah meresmikan kampung batik Tin Gundih di Jalan Sumber Mulyo IV, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan Kota Surabaya pada tanggal 24 Juni 2022. Kampung batik ini bermula dari program cangkrukan yang dilakukan pada tahun 2021 dengan camat dan lurah, dimana camat dan lurah diminta untuk dapat menghidupkan masing-masing wilayahnya. Dengan terbentuknya Kampung batik Tin Gundih ini melalui kolaborasi antara camat, lurah dan warga, akhirnya mampu menggerakkan ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui pemberdayaan usaha batik. Salah satu yang menjadi daya tarik dari kampung batik ini adalah kampung batik ini mengangkat motif desain yang luar biasa. Desain ini yang menjadi salah satu faktor bagaimana harga sebuah batik itu akan mahal atau tidaknya saat penjualan. (Pemerintah Kota Surabaya, 2022)

Setidaknya pada awal baru terbentuk kampung batik ini ada 25 warga yang terlibat dalam produksi pembuatan Batik Tin Gundih 25 warga ini 16 orang warga MBR dan 9 orang warga non-MBR. Hal ini sesuai dengan pernyataan ketua kampung batik Tin Gundih bahwa:

“Pada awal baru terbentuknya kampung batik ini jumlah pekerja sebanyak 25 orang, mereka yang terlibat terdiri dari warga MBR, warga non-MBR dan ada juga yang dari kader. Namun semakin kesini jumlah pekerja berkurang hal ini dikarenakan mereka memiliki pekerjaan lain dan ada pula yang sudah membuka usaha batik sendiri. Selain itu untuk mendaat pekerja baru sedikit kesulitan dikarenakan minat warga yang sedikit.” (Hasil wawancara pendahuluan 3 Oktober 2023)

Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan tersebut, ditemukan bahwa masalah peminatan dari masyarakatnya yang masih kurang. padahal sebelumnya para warga yang ingin bergabung dalam kampung batik ini akan mendapatkan

pelatihan keterampilan membuat dari Kelurahan Gundih. Hal ini juga dibenarkan oleh Budi Suwanto, S.T selaku pendamping salah satu Rw yang ada di Kelurahan Gundih, sebagai berikut:

“Beliau berharap dengan dilaksanakannya pelatihan bagi MBR yang diadakan oleh Pemerintah Kota Surabaya ini akan dapat meningkatkan keahlian dan dapat mengangkat perekonomian warga Kota Surabaya khususnya di Kelurahan Gundih pasca pandemi covid-19.”

(Sumber : <https://www.kimgundih.com/2022/05/perbaikan-ekonomi-masyarakat.html#more/> diakses 23 September 2023).

Seharusnya dengan adanya padat karya di Kelurahan ini jumlah pengangguran di Kelurahan ini berkurang, namun pada kenyataannya dengan adanya padat karya di Kelurahan Gundih ini dengan memberdayakan masyarakat sekitar yang termasuk dalam warga MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) masih terdapat banyak pengangguran di Kelurahan tersebut. Dapat dilihat pada gambar 1.5 ada lima kelurahan yang ada di Kecamatan Bubutan, Kelurahan Gundih yang memiliki lebih banyak pengangguran.

Tabel 1. 2 Jumlah Pengangguran di Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Tahun 2022

Kelurahan	Belum/Tidak Bekerja	Mengurus Rumah Tangga	Pelajar Mahasiswa	Pensiunan
Tembok Dukuh	6.662	4.701	4.383	153
Bubutan	3.286	2.601	2.399	65
Alon-Alon Contong	1.510	1.254	1.120	10
Gundih	7.207	5.217	4.584	134
Jepara	6.627	5.073	4.407	112
Jumlah	25.292	18.846	16.893	474

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2023

Di Kota Surabaya sendiri program padat karya ini dikhususkan untuk mengentaskan Gamis (Keluarga Miskin). Di Kelurahan Gundih sendiri sudah berupaya untuk menawarkan program kerja dari padat karya ini kepada masyarakat, baik itu

melalui RT, RW, KSH (Kader Surabaya Hebat) namun permasalahan yang dihadapi yakni minat dari masyarakatnya sendiri yang tidak ada. Hal ini juga dikatakan oleh Ibu Khusnul selaku kasi kesra Kelurahan Gundih sebagai berikut:

“Pihak dari kelurahan sendiri sudah berupaya dalam menawarkan program kerja dari padat karya ini sendiri melalui Rw-Rw dan dialokasikan ke Rt juga, bahkan pihak kelurahan juga sempat mendatangi rumah-rumah warga untuk mengajak dalam program padat karya ini. Namun hal ini kembali ke minat masyarakatnya juga, ada yang berminat dan ada juga yang tidak berminat. Bahkan bisa dikatakan lebih banyak yang tidak berminat. Banyak dari mereka warag MBR yang lebih mengandalkan bantuan BLT tanpa mau bekerja”
(Hasil wawancara pendahuluan 3 Oktober 2023)

Dari hasil wawancara pendahuluan tersebut salah satu penyebab dari angka pengangguran di Kelurahan Gundih masih tinggi di karena minat dari masyarakat untuk masih kurang. Hal ini yang masih menjadi permasalahan di Kelurahan Gundih dalam menjalankan program padat karya tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi program padat karya yang ada di Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari tujuan dilaksanakannya program padat karya dengan menggunakan teori implementasi David C. Korten. Dalam teori tersebut David C. Korten menjelaskan bahwa implementasi program didasarkan pada tiga unsur, dimana suatu program akan berhasil jika terdapat kesesuaian antara ketiga unsur implementasi program. Pertama program, kedua organisasi pelaksana, ketiga kelompok sasaran.

Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Implementasi Program Padat Karya Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Di Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan Kota Surabaya”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Program Padat Karya Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran di Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan Kota Surabaya?”

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui Implementasi Program Padat Karya di Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan Kota Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, baik penulis maupun pihak lainnya, terutama kalangan akademis atau masyarakat umum yang perlu mengetahui Implementasi Program Padat Karya di Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan Kota Surabaya.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis, yaitu sebagai berikut :

1. Melalui penelitian proposal skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang program padat karya dalam mengurangi tingkat pengangguran.
2. Sebagai tambahan pengetahuan bagi mahasiswa dan masyarakat dengan memperluas ilmu mengenai implementasi program padat karya di Kelurahan Gundih Kota Surabaya.

3. Sebagai syarat untuk mendapat gelar sarjana pada program studi Administrasi Publik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Dapat menjadi tambahan referensi dan literatur bacaan ilmiah di perpustakaan, sehingga mampu meningkatkan pengetahuan maupun menambah kajian-kajian untuk penelitian yang akan datang, dengan topik yang serupa.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa timur serta mengetahui tentang Implementasi Program Padat Karya di Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan Kota Surabaya.

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran Jawa Timur”

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi akademis yang memiliki lingkup penelitian yang sama terutama bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

3. Bagi Kelurahan Gundih Kota Surabaya

Sebagai bahan masukan, evaluasi atau kontribusi terkait Program Padat Karya di Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan Kota Surabaya.